

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Ade Suhendar dalam jurnal Keterbukaan Informasi Publik Bentuk Keseriusan Pemerintah Menuju Good Governance. Implementasi UU No.14 tahun

2008

Dwiyanto, agus. 2015. Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif, dan Kolaboratif. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada Press. Hal 14

Dede Rosyada Dkk, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia Dan Masyarakat Madani*,(Jakarta:ICCE UIN Syarif Hidayatullah,2000),Hal 182

Eko Sakapurna, Lina Miftahul, dkk dalam Laporan Penelitian UI, Telaah Implementasi UU KIP Wujud Penerapan Prinsip Good Governance, Studi Kota Surakarta dan Kab. Lombok Barat

F.Rachmadi, Perbandingan Sistem Pers di Berbagai Negara, (Jakarta:PT.Gramedia,1990)Hal 1

Jimly Asshidiqie, Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan Dalam Undang-Undang Dasar 1945, Yogyakarta FH-UIN Press, 2005, Hal 43

Jimly Asshidiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*,(Jakarta:Konstitusi Press 2005) Hal.298-299

Kooiman dan Van Villet 1993, Dalam Makmur.2003 hal 70

Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Keterbukaan Informasi Publik,

Dinhubkominfo Jateng&Komisi Informasi Jawa Tengah Tahun 2010

Ibid. Surjadi. 2009 Hal 65

Mahmudi. 2010. Manajemen Kinerja Sektor Publik, Edisi. Kedua. Sekolah

Tinggi Ilmu Manajemen YKPN. Yogyakarta. Hal 22

N.G.B. Mandica-Nur, Panduan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Untuk
Petugas Pengelolaan dan Pemberi Informasi di Badan Publik, (IRDI dan

USAID, Cetakan Pertama, 2009), Hal 7.

Nugroho, Bramasto, Hariadi Kartodihardjo, Sudarsono Soedomo, Hefrizal
Handra, Agus Setyarso, and Ali Djajono. *Financial Management Pattern*

*for Sub-national Public Service Agencies: Towards Independent Forest
Management Units (FMU)*. Ed. Bramasto Nugroho. Jakarta: Direktorat
Pengelolaan Area dan Persiapan Pemanfaatan Area Hutan (2013)

Ratminto dan Atik Septi Winarsih 2005. Manajemen Pelayanan
Yogyakarta:Pustaka Pelajar. Hal 246

Savas, E.S. 1987. Privatization: The Key to Better Government. New Jersey:

Chatam House Publisher. Hal 62

Surjadi. 2012. Pengembangan Kinerja Pelayanan Publik. Bandung: Reifika
Aditama. Hal 17

Sociological jurisprudence, merupakan pendekatan filosofis terhadap hukum
yang menekankan pada upaya rancang-bangun hukum yang relevan
secara secara sosial. Dengan kata lain, *sociological jurisprudence*
merupakan ilmu hukum yang menggunakan pendekatan sosilogi. Aliran

ini memberi perhatian pada dampak sosial yang nyata dari institusi, doktrin, dan praktik hukum.

Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, (Bandung: CV.Ramadja Karya, 1988), hal 80

Soerjono Soekanto, *Faktor-Fkator yang Mempengaruhui Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), Hal.8

Ratminto dan Atik Septi Winarsih 2005. *Manajemen Pelayanan* Yogyakarta:Pustaka Pelajar. Hal 246

Santosa,Pandji.2008.*Adminitrasi Publik:Toeri dan Aplikasi Good Governance*.Bandung:Refika Aaditama.HLM 133

Zahri H.A, *Implementasi Keterbukaan Informasi Melalui Optimalisasi di Pengadilan Agama*

2. Undang-Undang

Undang-undang Dasar 1945 Amandemen.

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Administrasi Pemerintahan. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.02/Menhut-II/2010 Tentang Sistem Informasi Kehutanan.

4. Internet

Penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* Dalam Meningkatkan Pelayanan

Publik di Kantor Camat Tangan-Tangan Kabupaten Aceh Barat Daya.

Diakses pada Tanggal 27 Januari 2019

[https://www.wartakepri.co.id/2019/02/19/hutan-batam-banyak-gundul-komisi-](https://www.wartakepri.co.id/2019/02/19/hutan-batam-banyak-gundul-komisi-iii-dprd-kepri-tanyakan-tupoksi-dinas-kehutanan/)

[iii-dprd-kepri-tanyakan-tupoksi-dinas-kehutanan/](https://www.wartakepri.co.id/2019/02/19/hutan-batam-banyak-gundul-komisi-iii-dprd-kepri-tanyakan-tupoksi-dinas-kehutanan/)